

INTISARI

Pesatnya pembangunan perkotaan dan laju perubahan guna lahan berdampak negatif terhadap lingkungan alam terutama terkait kelestarian air tanah. Program konservasi kawasan resapan air diperlukan untuk menekan dampak tersebut. Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan, integrasi program konservasi ke dalam sistem keuangan sangat penting untuk dilakukan. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui *Payment for Ecosystem Service* (PES) yang dapat diterapkan sebagai bagian dari program konservasi lahan kawasan resapan air.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan skema PES (*ex-ante*) di sebuah kawasan resapan air di Kabupaten Sleman dari perspektif masyarakat. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena tingginya ketergantungan kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta terhadap kelestarian kawasan resapan air dan ancaman konversi lahan terbangun. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan 104 responden yang disebar secara *multistage random sampling*. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar kesediaan masyarakat penerima manfaat untuk berkorban dan seberapa besar kompensasi yang diharapkan pemilik lahan untuk melestarikan lahannya sebagai area resapan air. Prinsip valuasi lingkungan digunakan untuk mendesain survei ini. Selain itu, dilakukan identifikasi faktor yang memengaruhi kemauan untuk melestarikan lahan dengan menggunakan regresi logistik biner.

Hasil analisis memperlihatkan adanya gap yang sangat besar antara nilai minimal kompensasi yang diminta pemilik lahan (Rp 133.023.589.015/tahun) dan nilai WTP penerima manfaat (Rp 44.865.408.000/tahun). Selain itu, sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan yang masih terbatas mengenai skema PES. Pengetahuan terhadap jasa ekosistem, skema PES, serta usia mempengaruhi kesediaan untuk mendukung pelestarian kawasan resapan air. Skema PES dapat diterapkan jika didukung oleh kebijakan yang sesuai dengan preferensi publik. Misalnya, skema pembiayaan *public payment* melalui pajak dapat dilakukan sebagai skenario pelaksanaan konservasi lahan resapan air pada skala regional. Untuk mendukung kebijakan ini diperlukan sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait PES dan jasa ekosistem. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai WTP dan mengurangi gap antara nilai kompensasi minimal dengan nilai WTP.

Kata kunci: Tantangan, PES, peluang, kawasan resapan air, valuasi lingkungan.

ABSTRACT

Rapid urban development and land use change generate negative impacts to the environment especially related to groundwater sustainability. Conservation of water catchment area is needed to reduce these impacts. According to sustainable development principles, the integration of conservation programs into the financial system is very important. This integration can be done by implementing Payment for Ecosystem Service (PES) as part of a conservation program for water catchment area.

This research aims to identify the opportunities and challenges for implementing PES schemes (ex-ante) from a public perspective in a water catchment area in Sleman District. This research is important because urban agglomeration area highly depends on the conservation of water catchment areas. This study used questionnaires to identify public understanding of PES and respondents were chosen based on multistage random sampling. This survey also revealed how much the beneficiary community is willing to pay and how much the landowners ask for compensation of conserving their land. The principles of environmental valuation were used to designed this survey. This research also identified factors that influence landlords' willingness to conserve using binary logistic regression.

The results show a gap between the minimum value of compensation requested by land owners (IDR 133,023,589,015/year) and the value of beneficiaries' willingness to pay (WTP) (IDR 44,865,408,000/year). Most respondents have limited knowledge of PES schemes. Knowledge of ecosystem services, PES schemes, and age affect the willingness to support the conservation of water catchment areas. However, this study observed an opportunity for PES schemes implementation if it is supported by policies that accommodate public preferences. For example, public payment financing schemes through taxes can be implemented to support a conservation program in a regional-scale. To support this policy, socialization and training are needed to increase public knowledge and understanding of PES and ecosystem services, and to reduce the gap between the minimum compensation value and WTP value.

Keywords: Challenges, environmental valuation, opportunities, PES, water catchment area